



ISBN 978-602-6204-95-0

Prosiding
Seminar Nasional

Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah
Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

Gorontalo, 3- 6 September 2019

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019**

*Editor:
Harto Malik
Muslimin
Herman Didipu
Farid Muhamad*



**Penerbit:
UNG Press**



Prosiding Seminar Nasional

Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah

Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

Gorontalo, 3-6 September 2019

Narasumber:

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.

(Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti)

Dr. Uwes Anis Chaeruman

(Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, Kemristekdikti)

Steering Committee:

Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.(UNDIKSHA)

Dr. Harto Malik, M.Hum. (UNG)

Dr. Trisakti, M.Si. (UNESA)

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. (FS UM)

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. (UNY)

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd (UNJ)

Dr. Isda Pramuniati, M.Hum. (UNIMED)

Dr. Donal Matheos Ratu, M.Hum (UNIMA)

Dr. Syukur Saud, M.Pd. (FBS UNM)

Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum. (FSD UNM)

Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. (FBS UNNES)

Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd. (FBS UPI)

Dr. Zakarias S. Soetedja, M.Sn. (FPSD UPI)

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum. (FBS UNP)

Susunan Kepanitiaan

Ketua : Rosma Kadir, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 1 : Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd

Wakil Ketua 2 : Novi Rusnarty Usu, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 3 : Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn

Sekretaris : Farid Muhamad, S.Pd., M.A.

Bendahara : Rahnikmawati Hasan, A.Md.

Reviewer:

Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd.

Nonni Basalam, M.A., Ph.D.

Dr. Dakia Djou, M.Hum.

Dr. Rahman Taufiqrianto Dako, S.S, M.Hum.

Novi R. Usu, S.Pd., M.A.

Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn.

Editor:

Harto Malik

Muslimin

Herman Didipu

Farid Muhamad

Redaksi:

Dr. Muslimin, S.Pd., M.Pd.

Alamat: Jln. Jend. Sudirman No. 6

Kota Gorontalo

Email: forumfbsi@ung.ac.id

HP/WA. 081243230260

ISBN : 978-602-6204-95-0

Diterbitkan: September 2019

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Diterbitkan oleh:
UNG Press Gorontalo

**Prosiding
Seminar Nasional**

**Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0
Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah
Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)**

Gorontalo, 3–6 September 2019

Copyright © FSB Universitas Negeri Gorontalo, 2019
Diterbitkan oleh Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)
Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo
dan Penerbit UNG Press, 2019
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
e-mail: forumfbsi@ung.ac.id

Editor:

Harto Malik
Muslimin
Herman Didipu
Farid Muhamad

Tata Letak dan Sampul:

Farid

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)
PROSIDING SEMINAR NASIONAL FFBSI
Gorontalo: UNG Press, 2019
xi + 583 hlm; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-6204-95-0

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Umum

Pasal 1:

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Prosiding ini dapat diselesaikan. Prosiding ini berisi makalah yang ditulis oleh para akademisi dalam bidang bahasa, sastra, seni, desain, dan perpustakaan baik dari perspektif konseptual/teoretik maupun praktik baik (*best practice*) dalam usaha peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan akademik dan pembelajaran, hingga tata kelola penjaminan mutu. Semua makalah dipresentasikan dalam sebuah forum ilmiah Seminar Nasional dalam rangka Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI) yang dilaksanakan pada 3 s.d. 6 September 2019 bertempat di Hotel Nayumi Horison, Gorontalo.

Forum Fakultas Bahasa dan Seni (FFBSI) yang dilaksanakan di Gorontalo (2019) merupakan forum ke-8. Forum pertama dilaksanakan di Jakarta (2005), selanjutnya Makasar (2007), Manado (2009), Bandung (2011), Malang (2013), Padang (2015), dan terakhir di Undiksha (2017). Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan forum tersebut, pada 2019 di Gorontalo digelar kegiatan Seminar Nasional sebagai salah satu agenda kegiatannya. Seminar ini dimaksudkan untuk menjadi ajang bertukar pikiran dan pendapat seputar hasil kajian, serta berbagi informasi seputar praktik baik (*best practice*) tentang tata kelola kelembagaan.

Seminar Nasional yang digelar mengangkat tema utama “**Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0**” yang dibagi ke dalam lima subtema sebagai berikut.

1. Revitalisasi Kurikulum FBS yang berorientasi pada Literasi Baru
2. Implementasi Pembelajaran (Pengembangan bahan Ajar, Metodologi, Media dan Evaluasi) Berbasis Teknologi Digital
3. Penguatan SDM Menghadapi Revolusi Industry 4.0
4. Penguatan Karakter Mahasiswa Memenuhi Tuntutan Dunia Global
5. Paradigma Baru Penjaminan Mutu Program Studi

Kesuksesan pelaksanaan seminar ini merupakan kesuksesan dari seluruh rangkaian kegiatan Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI). Sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga selesai kegiatan, tidak sedikit tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tidaklah mungkin semua itu dapat terwujud tanpa ada kontribusi yang besar dari semua pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A., selaku Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti.
2. Dr. Uwes Anis Chaeruman, Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, Kemristekdikti.
3. Plt. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Drs. John Hendri, M.Si., Ph.D.
4. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.
5. Ketua Forum FBSI, Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A. periode 2017-2019.
6. Dekan Fakultas Sastra dan Budaya UNG, sekaligus Ketua Forum FFBSI periode 2019-2021.
7. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Bahasa dan Sastra, dan Fakultas Seni dan Desain, se-Indonesia.
8. Pimpinan jurusan dan program studi yang tergabung dalam Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia.
9. Ketua dan seluruh panitia pelaksana.
10. Seluruh pemakalah dan peserta Forum FBSI.

Semoga rumusan pemikiran yang tertuang dalam setiap makalah dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pengembangan kajian keilmuan dan tata kelola kelembagaan Fakultas Bahasa dan Seni pada masa mendatang.

Gorontalo, September 2019

Tim Editor

DAFTAR ISI
PROSIDING SEMINAR NASIONAL FORUM FAKULTAS BAHASA
DAN SENI INDONESIA (FFBSI)
Tanggal 3-6 September 2019
Horison Nayumi Hotel Gorontalo

HALAMAN SAMPUL	i
EDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
<i>BAGIAN 1: REVITALISASI KURIKULUM FBS YANG BERORIENTASI</i> <i>PADA LITERASI BARU</i>	1
1. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS BAHASA DAN SENI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT Ifan Iskandar, FBS Universitas Negeri Jakarta	2
2. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH (BUGIS/MAKASSAR) YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Kembong Daeng, FBS UNM Makassar	19
3. REVITALISASI KURIKULUM FBS UNESA GUNA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN DUNIA GLOBAL Maria Mintowati, FBS Unesa Surabaya	32
4. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FBS UNESA 2019 DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Miftachul Amri, Universitas Negeri Surabaya	38
5. REVITALISASI KURIKULUM PRODI. PENDIDIKAN BAHASA JERMAN DALAM MENYIKAPI TANTANGAN DUNIA GLOBAL Syamsu Rijal, Muh. Anwar, Misnah Mannahali, Prodi. Pendidikan Bahasa Jerman, FBS. Universitas Negeri Makassar	50

6. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Ayu Trihardini, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Negeri Jakarta	62
7. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FBS UNIMA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU DI ERA INDUSTRI 4.0. Sherly F. Lensun, Pendidikan Bahasa Jepang FBS Unima Manado	73
8. REVITALISASI KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BERORIENTASI PADA LITERASI BARU I Made Astika, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha	102
9. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI FBS UNP BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Elva Rahmah, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang	118
10. REVITALISASI KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG: PELUANG DAN TANTANGAN ABAD-21 Didik Nurhadi, FBS Universitas Negeri Surabaya.....	134
11. REVITALISASI KURIKULUM PRODI SASTRA INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Yenni Hayati, FBS UNP Padang	146
12. REVITALISASI KURIKULUM DESAIN KOMUNIKASI VISUAL BERBASIS DIGITAL Marsudi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya	157
13. STRATEGI REVITALIASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN SENI RUPA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Bandi Sobandi, Departemen Pendidikan Seni Rupa FPSD UPI Bandung	173
14. EVALUASI KURIKULUM DI JURUSAN SENI RUPA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Indah Chrysanti Angge, Fera Ratyaningrum, Jurusan Seni Rupa FBS, Universitas Negeri Surabaya.....	190

15. PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN: WACANA MAYOR MINOR DI UNESA Dwi Imroatu Julaikah, FBS UNESA, Surabaya	203
16. KEKHASAN KURIKULUM PRODI PBSI FBS UNESA DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Heny Subandiyah, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS Unesa Surabaya	210
17. KURIKULUM BERORIENTASI KETAHANAN BUDAYA Ipong Niaga, Jurusan Sendratasik FSB Universitas Negeri Gorontalo	218
BAGIAN 2: IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL	226
1. PEMBELAJARAN ABAD 21 BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL Wahyu Tri Atmojo, Mesra, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan	227
2. KESELARASAN ANTARA MINAT DENGAN KEBERHASILAN BELAJAR BAHASA JERMAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Misnawaty Usman, Syamsu Rijal, Muh.Anwar, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing FBS UNM Makassar	241
3. PENGGUNAAN METODE PARTISIPATIF BERBASIS <i>BLENDED LEARNING</i> DALAM PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG ERA 4.0 Yuniarsih, FBS Universitas Negeri Jakarta	255
4. PEMANFAATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA Amira Agustin Kocimaheni, Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, FBS Unesa Surabaya	267
5. APPLICATIONS OF HOT POTATOES IN EVALUATION INSTRUMENTS UNIVERSITY OF JAKARTA N. Lia Marlina, Indonesian Language and Literature Education Study Program Faculty of Language and Art, Jakarta State University	281
6. <i>EXTENSIVE READING</i> DARI FORMAT CETAK KE DIGITAL: PRAKTIK BAIK DAN TANTANGANNYA Pratiwi Retnaningdyah, Prodi Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya	298

7. MODEL PEMBELAJARAN KREATIF PADA KETERAMPILAN MEMBACA DI SMP Ririn Pusparini, FBS Universitas Negeri Surabaya	313
8. TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT NA GOK BATAK TOBA (KAJIAN PRAGMATIK) M.Okky Fardian Gafari, Syamsul Arif, Fitriani Lubis, FBS Unimed Medan	321
9. KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM DALAM MENGURAI PUTUSAN PERKARA Rosma Kadir, Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo	335
10. ALIH WAHANA NOVEL <i>ATIRAH</i> KARYA ALBERTHINE ENDAH KE DALAM FILM <i>ATIRAH</i> KARYA RIRI RIZA Nensilianti, FBS UNM Makassar	346
11. SASTRA DIGITAL, LITERASI DIGITAL, DAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Anas Ahmadi, FBS Unesa Surabaya	361
12. MUATAN SASTRA ANAK DI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG LITERASI MANUSIA Atikah Ruslianti, Eka Putri Utami, Annisaa Syifa Nuramalina, Sastra Inggris FBS Universitas Negeri Jakarta	374
13. THE DEVELOPMENT OF GAMBANG RANCAG ORAL LITERATURE TEACHING IN BETAWI COMMUNITY Siti Gomo Attas, FBS Universitas Negeri Jakarta	384
14. DESAIN GRAFIS DALAM INDUSTRI KREATIF YANG MEMANFAATKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Hendro Aryanto, Program Studi Desain Grafis, Jurusan Desain FBS Universitas Negeri Surabaya	495
15. TANTANGAN PRODI DKV DALAM MENYIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Abdul Azis Said, Dian Cahyadi, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar	405
16. PENGEMASAN BAHAN AJAR SENI BUDAYA BERBASIS MEDIA INTERAKTIF UNTUK SEKOLAH MENENGAH Sitti Rahmah, Uyuni Widiastuti, Nurwani, Panji Suroso	427

BAGIAN 3: PENGUATAN SDM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRY 4.0 **442**

1. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI FBS UNESA
Ina Ika Pratita, FBS Unesa Surabaya 443
2. PROFESIONALISME PENDIDIK ABAD 21
Ahmad Syaifudin, FBS Universitas Negeri Semarang 451
3. PERAN GURU DALAM UPAYA REVOLUSI MENTAL SISWA MELALUI AKTIVITAS MUSIKAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Syahrul Syah Sinaga, FBS Universitas Negeri Semarang 459
4. PELATIHAN PTK BAGI GURU BAHASA PRANCIS SMA DI DKI JAKARTA
Sri Harini Ekowati, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, FBS-Universitas Negeri Jakarta 471
5. CRITICAL AND CREATIVE READING SKILLS IN THE STATE SISTEM KUOTA PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM KEPENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GURU
Mujimin, FBS Unnes Semarang..... 479

BAGIAN 4: PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA MEMENUHI TUNTUTAN DUNIA GLOBAL **488**

1. PENGEMBANGAN KARAKTER BAGI MAHASISWA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Syafi'ul Anam, Wiwiet Eva Savitri, Trisakti, FBS Universitas Negeri Surabaya... 489
2. PENGUATAN KARAKTER ALTRUISME DALAM NASKAH AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Ratna Dewanti 499
3. MEMBANGUN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN MUSIK
Moh Sarjoko, FBS Unesa Surabaya..... 506
4. PAKAIAN BERMOTIF TIPOGRAFI PRANCIS SEBAGAI BENTUK INDUSTRI KREATIF DAN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA
Zulherman, Tengku Ratna Soraya, Pengadilen Sembiring, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan 515

BAGIAN 5: PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI **528**

1. PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SASTRA JERMAN MELALUI
PENELUSURAN ALUMNI
Yunanfathur Rahman, Program Studi S1 Sastra Jerman, Universitas Negeri
Surabaya 529

2. THE NEW PARADIGM OF QUALITY ASSURANCE OF FINE ART
STUDY PROGRAM BASED ON DATA LITERACY AND TECHNOLOGY
LITERACY
Drs. Panji Kurnia, M.Ds, Fine Arts Education Study Program - FBS,
Jakarta State University 535

3. TANTANGAN PRAKTIK BAIK PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI
Dwi Kusumawardani, Program Studi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa
dan Seni Universitas Negeri Jakarta 548

4. STUDI KORELASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN SENI RUPA DENGAN KEMAMPUAN AWAL
BERDASARKAN HASIL TES UJI KETERAMPILAN BIDANG SENI RUPA
SELEKSI MASUK PTN SEBAGAI STRATEGI PENJAMINAN MUTU
PRODI
Syakir, Mujiyono, Chiqa Rasmi Basyakiya, Program Studi Seni Rupa, FBS Unnes
Semarang 557

5. PARADIGMA BARU PENJAMINAN MUTU PRODI PENDIDIKAN BAHASA
JEPANG FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Silvia Nurhayati, FBS Universitas Negeri Semarang 574

TANTANGAN PRODI DKV DALAM MENYIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Abdul Azis Said, Dian Cahyadi
Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain
Universitas Negeri Makassar
abd.azis.said@unm.ac.id
dian.cahyadi@unm.ac.id

ABSTRAK

Program Studi Desain Komunikasi Visual sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan profesi tentunya mengedepankan persoalan mutu luaran. Hal ini berkorelasi dengan berbagai persoalan di masyarakat yang menjadi konsentrasi profesi DKV sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan berbagai persoalan tersebut dalam bentuk visual. Pada tahun 2008 diterbitkan sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang menjadi acuan perguruan tinggi dalam hal jaminan mutu pendidikan. Persoalannya adalah atmosfir pendidikan Prodi DKV yang bidang keilmuannya dituntut untuk terus menerus melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan akan tuntutan profesi. Luaran dituntut dapat melakukan akselerasi dengan dunia industri yang dinamika profesinya sangat progresif terhadap tuntutan perkembangan jaman kompleksitas konvergensi keilmuannya sangat cepat (Tantangan Revolusi Industri). Panduan SPMI terbaru yang versi 2018 sesungguhnya telah sangat fleksibel dengan keleluasaan terhadap kekhasan jenis pendidikan tinggi, telah memberikan keleluasaan dalam menyusun acuan-acuan standar yang ditetapkan oleh asosiasi program studi, dan keleluasaan melakukan sinkronisasi acuan standar-standar tersebut dengan asosiasi profesi. Namun belum adaptif dengan tuntutan dan tantangan Revolusi Industri yang menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi yang terus mempengaruhi sistem pendidikan sekaligus mekanisme ketenagakerjaan di seluruh dunia. Makin menguatnya kecenderungan *non-traditional students*, yang berarti menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri, misalnya transformasi ke sistem pembelajaran daring (online) dan *distance learning programs*. Oleh sebab itu, pembelajaran daring merupakan jalan keluar. Kecenderungan pembelajaran daring ini juga sudah harus diakomodasikan ke dalam pembelajaran di kelas-kelas dewasa ini. Pembelajaran daring ini bisa jauh lebih efisien dan efektif. Sehingga dibutuhkan pemikiran dalam merumuskan metode-metode acuan Standar Jaminan Mutu yang akomodatif dan adaptif dalam menjawab tantangan tersebut.

Kata kunci: paradigma, revolusi industri 4.0, sistim penjaminan mutu, luaran prodi DKV

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan yang sangat dirasakan sekarang ini adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk memenuhi sumber daya manusia pembangunan bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan". Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana amanat yang dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. (Sulaiman & Wibowo, 2016)

Sejak dituangkan dalam bentuk Undang-Undang pada tahun 2012, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada tahun 2010. Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi. Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang, yaitu UU Dikti, maka setiap perguruan tinggi berkewajiban mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti. (Tim, 2018)

Mengingat setiap Perguruan Tinggi memiliki kekhasan, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tidak menetapkan kebijakan satu model implementasi SPMI untuk semua Perguruan Tinggi, melainkan memberikan inspirasi tentang implementasi hal-hal esensial dalam SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk memandu implementasi SPMI Dikti tersebut, dipandang perlu diberikan Pedoman SPMI yang dilengkapi dengan Pedoman SPMI untuk Jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Selain itu, karena terdapat modus pendidikan jarak jauh, baik pada pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi, maka dipandang perlu untuk memberikan Pedoman SPMI untuk Pendidikan Jarak Jauh. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan Perguruan Tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga dapat dikembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah membuat pedoman dalam pelaksanaan SPMI yang bertujuan untuk memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur,

sumber daya, dan pola kepemimpinan. Agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders yang terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tersebut secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui masalah, antara lain: (1) kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholders relatif masih rendah; (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademika untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang; (4) ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan (5) implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan. (Sulaiman & Wibowo, 2016)

Mutu merupakan cerminan hasil akan keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa. Mutu secara garis besar memiliki pengertian adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan. Hedwig & Polla (2006, pp.1-3) dalam (Sulaiman & Wibowo, 2016) menjelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Oleh karenanya, proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus. Sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) akan menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang baik, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya yang merupakan indikator keberhasilan dari pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan. Sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) digunakan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai indikator keberhasilan dari pendidikan yang bermutu.

B. PEMBAHASAN

1. Paradigma Tantangan Revolusi Industri 4.0.

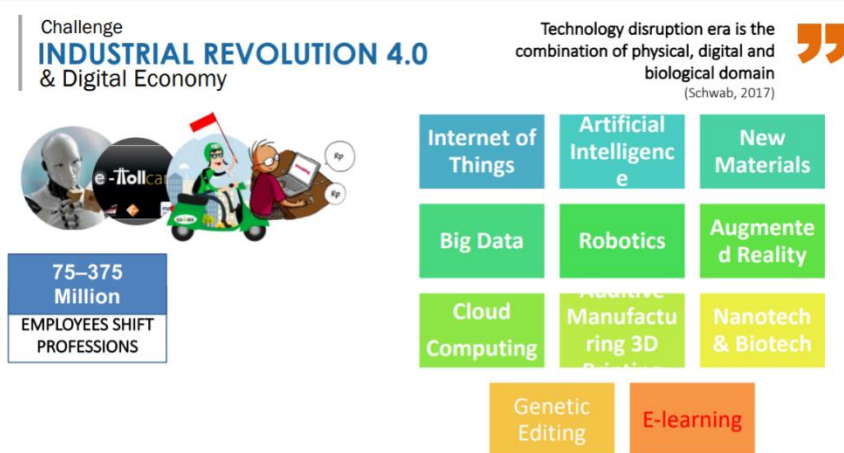
Teknologi informasi dan komunikasi terus mempengaruhi sistem pendidikan sekaligus mekanisme ketenagakerjaan di seluruh dunia. Makin menguatnya kecenderungan *non-traditional students*, yang berarti menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri, misalnya transformasi ke sistem pembelajaran daring (*on-line*) dan *distance learning programs*. Sekalipun Indonesia belum masuk ke dalam kelompok negara-negara terbesar yang sudah memanfaatkan program-program demikian, potret tersebut sudah seharusnya diantisipasi.

Revolusi industri keempat yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. merupakan era inovasi disruptif, di mana inovasi ini berkembang sangat pesat, sehingga mampu membantu terciptanya pasar baru. Inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan lebih dahsyat lagi mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Termasuk semua sistem administrasi dan manajemen konvensional saat ini (Darmawan, 2018).

Ismunandar dalam sambutannya di BINUS University terkait tantangan pendidikan di era revolusi 4.0, bahwa “Indonesia hingga saat ini masih terus berkuat pada permasalahan klasik, seperti persentase populasi yang mengenyam pendidikan tinggi yang baru sekitar 32%, sementara pengguna teknologi informasi dan komunikasi tergolong dengan populasi sangat besar di dunia. Sekalipun biaya kuliah di berbagai perguruan tinggi Indonesia pada umumnya terbilang “tidak mahal”, kesempatan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi belum menggembirakan. Oleh sebab itu, pembelajaran daring merupakan jalan keluar. Kecenderungan pembelajaran daring ini juga sudah harus diakomodasikan ke dalam pembelajaran di kelas-kelas dewasa ini. Pembelajaran daring ini bisa jauh lebih efisien dan efektif (Business Law, 2019).

Jack Ma (CEO Alibaba Group) dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018, menyatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin.

Lee et al (2013) dalam (Sukartono, 2018) menjelaskan, industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D *printing*. Lifter dan Tschienner (2013) dalam (Sukartono, 2018) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem *cyber*-fisik, internet untuk segala atau *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan (*cloud computing*), layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai (Simatupang, 2018).



Gambar 1. Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
Sumber: Ali Gufron Mukti (Mukti, 2018)

Perubahan zaman tidak bisa dihindari, dan tugas kita adalah untuk mencari peluang dari tantangan tersebut. Diperlukan sikap untuk segera merevolusi sistem pembelajaran dan sistem jaminan mutu dalam menghadapi Revolusi Industri ini.

Sesungguhnya KKNI 2016 dirancang untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. dengan mensyaratkan terkait model pembelajaran berbasis produk, di mana di dalamnya dibutuhkan arahan kepada mahasiswa dengan; (1) tugas rutin; (2) *critical book report*; (3) *critical journal/research report*; (4) rekayasa ide; (5) *mini research*; dan (6) *project*.



Gambar 2. Proyeksi perubahan urutan dan komponen kemampuan luaran individu (*skill set*)
(Sumber: Future of Jobs Report, World Economic Forum 2018)

Membekali mahasiswa dengan kemampuan berfikir kritis dan dapat memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kreatif dan mampu berkolaborasi. Perubahan *mindset* tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan TIK dalam pembelajarannya. Metode dan sistem pembelajaran adaptif dengan memanfaatkan TIK. Penyesuaian kurikulum yang membekali mahasiswa dengan pemahaman terkait *big data*, kecerdasan buatan, dan masyarakat digital.

Perguruan tinggi harus melakukan tindakan eksponensial menyikapi Revolusi Industri. Harus ada efisiensi waktu, efektifitas pengajaran dan metode. Kesadaran bahwa peran pendidik bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi namun sebagai pengarah, fasilitator/mediator dan pemberi nilai. Oleh karena itu, pendidik harus mengurangi dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu mengungguli kecerdasan mesin. Pendidikan yang diimbangi dengan karakter dan literasi menjadikan peserta didik akan sangat bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan masyarakat.

Pendidik butuh kompetensi Revolusi industri 4.0 yakni: (1) kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skill*). Kemampuan meramu pembelajaran sehingga dapat meng-eksplor kompetensi inti dari diri peserta didik; (2) kemampuan

komunikasi dan kolaboratif (*communication and collaborative skill*). Kemampuan konstruktif dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi; (3) keterampilan berpikir kreatif dan inovasi (*creativity and innovative skill*); (4) kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*) agar tidak tertinggal dengan peserta didik; (5) kemampuan pembelajaran kontekstual (*contextual learning skill*); (6) kemampuan literasi informasi dan media (*information and media literacy*). Saat ini fenomena media informasi bersifat sosial yang banyak digandrungi peserta didik. Media sosial seolah menjadi media komunikasi yang ampuh digunakan peserta didik dan pendidik, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan menjadi salah satu media pembelajaran. Dengan demikian, sebetulnya kehadiran ‘kelas digital’ berbasis media sosial ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik, agar pembelajaran berlangsung tanpa batas ruang dan waktu.

2. Arah SPM Prodi DKV

2.1 Dasar Pijakan

UU No.12/2012 pada Bab III pasal 51 hingga 53, Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Peraturan BAN PT No. 02/2017.

Berdasarkan peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 terkait Perbaikan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*), maka dilakukan pengukuran didasarkan pada integrasi (sinkronisasi) dua variabel utama yakni SPMI (kredibilitas) dan SPME (akuntabilitas), sebagaimana pada gambar 3 berikut ini.

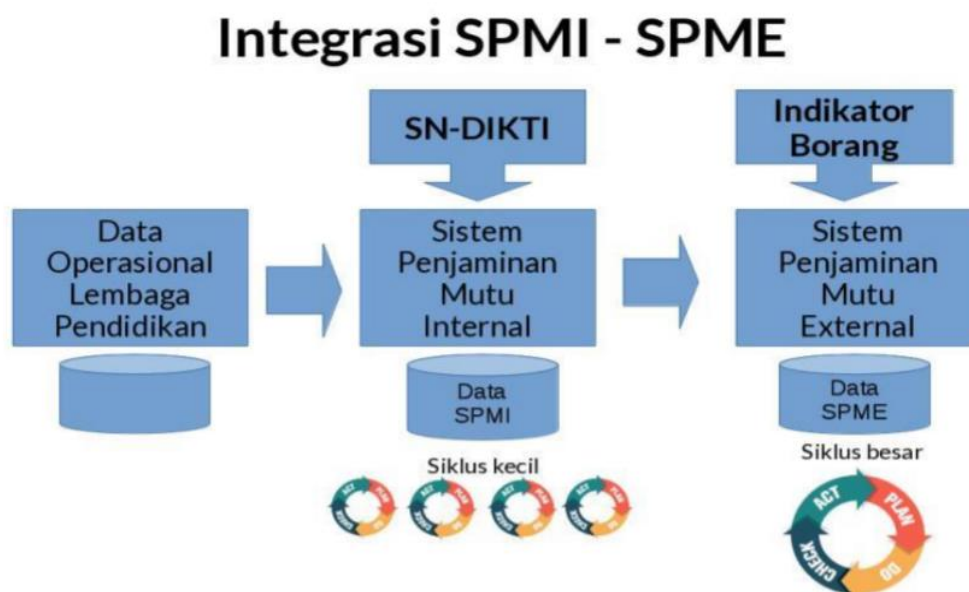


Gambar 3. Skema Integrasi SPMI – SPME BAN-PT tahun 2017

Tentang Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kemudian lahir atas kebutuhan dan jawaban atas tantangan ke depannya sebagai bentuk penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) diubah tentang Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. dan tentang ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- b. Ketentuan Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) tentang Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang (ayat 4), Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor (ayat 5), dan tentang Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi (ayat 5). Serta sisipan ayat 5a tentang Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. Perubahan yang terkait langsung arah SPMI adalah pada jaminan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik untuk bidang ilmu terapan.

Dengan terbitnya Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 memberikan peluang bagi prodi-prodi untuk membangun kekhasannya yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan industri.



Gambar 4. Model Integrasi berdasarkan SN-Dikti 2016 (Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi)

Merujuk kepada model integrasi tersebut belum memperlihatkan bahwa model penjaminan mutu masih bersifat eksternal dalam lingkup SN-Dikti. Sehingga acuan mutu yang bersifat rekomendasi dari pengguna belum terakomodir. Diperlukan keterbukaan untuk itu, sehingga baku mutu luaran sesuai kebutuhan industri.

2.2 Konsep SPM

Secara dasar, konsepsi Penjaminan Mutu mencakup; 1. SISTEM: terkait rancangan akademik 2. ORGANISASI: tentang Tata Pamong, struktur, Tata Kelola 3. PERSONAL: pengelola Manajemen Mutu 4. MEKANISME: Siklus Mutu yang dijalankan dan dilaksanakan, Tugas dan Fungsi.

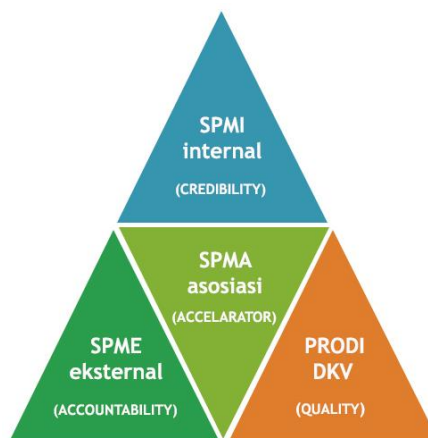


Gambar 5. Model Manajemen SPMI Pasal 52 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012.
 Sumber: SN-Dikti

Secara garis besar permasalahan dalam menyikapi tantangan peradaban Revolusi Industri 4.0 dan selanjutnya, dibutuhkan sebuah kerangka dan standar yang bersifat fleksibel dan adaptif yang bersumber dari berbagai masukan-masukan berdasarkan kebutuhan industri.

2.3 Arah SPM Prodi DKV di Indonesia

Merujuk kepada dasar pijakan dan konsepsi dasar SPM, yakni; sistem, organisasi, personal, mekanisme, maka dibutuhkan sebuah metode-metode yang bersifat terbuka yang bertujuan sebagai akselerator terhadap kredibilitas dan akuntabilitas kualitas lulusan. Akselerator berfungsi untuk memberikan masukan dan menetapkan standar acuan jaminan mutu kepada industri. Sehingga mutu luaran/lulusan benar-benar *guaranted*.



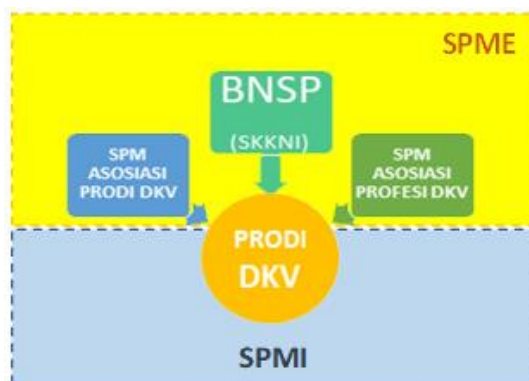
Gambar 6. Model Integrasi SPMI-SPME-SMA

Akselerator berasal dari lembaga atau institusi ruang lingkup eksternal (SPME) yakni Asosiasi Program Studi DKV dan lembaga atau institusi ruang lingkup terkait (relasi mutual) yakni Asosiasi Profesi DKV.

Fungsi akselerator sebagai *hub* bagi DKV dan luarannya. Sebagai perantara mutual/meditor bagi Prodi DKV dan luarannya, akselerator juga berfungsi untuk mengkurasi mutu luaran dalam bentuk acuan-acuan standar baku dalam Sistem Penjaminan Mutu Asosiasi (SPMA).

1. Integrasi dan Sinkronisasi SPM antara SN-Dikti – SPM Asosiasi Program Studi DKV – SPM Asosiasi Profesi DKV.

Syarat dalam menghadapi setiap tantangan yang jadi setiap masalah sebuah institusi dalam ruang lingkup yang lebih besar umumnya dilakukan dengan model membangun relasi-relasi dengan institusi lainnya sehingga memungkinkan untuk diperoleh kekuatan inter-relasi yang berdampak terhadap ancaman dan tantangan tersebut.



Gambar 7. Integrasi Acuan Standar Kualitas-Mutu dalam ruang lingkup SPME-SPMI.

2. Sinkronisasi KKNI dan SKKNI

Kekuatan Prodi DKV dalam menghasilkan mutu luaran yang kompetitif adalah berdasarkan dari cerminan kerangka kurikulum yang diterapkan, dimana seharusnya difokuskan pada: (1) Kelengkapan Sistem; (2) *Compliance*; (3) *Effective*; (4) Kinerja dan Kepuasan (*satisfaction*).

KKNI yang berdasarkan pada Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 ditujukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi kerja dan fokus dari KKNI ini sendiri adalah kualifikasi profesi di lapangan kerja/industri. Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang KKNI, jenjang-jenjang kualifikasi ini akan mencakup kualifikasi Pelaksanaan, Pengetahuan, hingga

Otonomi (kemampuan penyelesaian masalah)-nya. Dengan adanya KKNi ini, kualifikasi di tiap levelnya disetarakan dengan latar belakang jenjang pembelajaran (Ekarahendy, 2015).



Gambar 8. Strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi
(Sumber: dgi.or.id)

Tahun 2015 Asosiasi Desain Grafis Indonesia bersama Prodi-Prodi DKV se-Indonesia telah melakukan pembahasan dalam upaya mensinkronkan KKNi dan SKKNI, yang menghasilkan formula *output learning outcome* yang menghubungkan kompetensi luaran berdasarkan KKNi (akademik) dan SKKNI (profesi). Hal ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

Sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan pada capaian Secara umum KKNi diharapkan dapat melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran yang: a) komprehensif dan berkeadilan; b) memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur; c) bersifat lentur (*flexible*); d) pendorong program-program peningkatan mutu; e) mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessment) terhadap badan atau lembaga ; f) secara akuntabel dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja; g) dapat menjadi panduan bagi para pencari kerja yang baru maupun lama; h) dapat menguatkan integrasi dan koordinasi

badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada; i) diharapkan mencakup sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL (Cahyadi, 2017).

Konsep dasar KKNI tersebut mengandung makna kesetaraan dan pengakuan yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu KKNI harus dilengkapi dengan mekanisme dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya saling pengakuan. Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas hal ini memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas dan integritas (Kemenristekdikti, 2015) (Cahyadi, 2017).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 21/Men/X/2007. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya standar kompetensi desain grafis dikeluarkan dalam surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 109 tahun 2010 mengenai penetapan rancangan standar kompetensi nasional Indonesia sektor komunikasi dan informatika sub sektor teknologi dan informatika bidang desain grafis menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia menjelaskan bahwa era liberasi pasar global dan perdagangan bebas dalam lingkup internasional (WTO) mengenai kesepakatan mobilitas tenaga profesional di dalam ASEAN terhadap kesepakatan untuk MRA (Mutual Recognition Arrangement). Dengan demikian, SKKNI meliputi kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan desain grafis/desain komunikasi visual oleh keseluruhan *stakeholder* di bidangnya yang berisikan rumusan kemampuan yang harus dimiliki individu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya berdasar pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang telah disetujui oleh pekerja sebagai syarat sebelum terjun dalam bidang pekerjaan tersebut (Arifianto, 2019).



Gambar 9. Peta profesi bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual.
 Sumber: SKKNI Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual, Kominfo, 2016.

3 Kompetensi Luaran Berbasis Sertifikasi Internal

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual, mensyaratkan berbagai standar dan acuan penilaian. Tonggak lahirnya kepmen tersebut bertujuan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar kerja dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Sehingga Prodi DKV dituntut untuk mampu menyediakan SDM berkualitas sesuai dengan kualifikasi kebutuhan industri yang diharapkan akan menjamin kesinambungan dari industri. Untuk itu diperlukan rumusan standar kualifikasi SDM yang dibutuhkan industri dan harus juga memiliki kesetaraan dan relevansinya terhadap standar yang berlaku pada sektor industri di negara lain, bahkan berlaku secara internasional, kemudian diwujudkan ke dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki luaran yang akan bekerja di bidang profesi sebagai desainer komunikasi visual (Cahyadi, 2017).

Upaya memberikan jaminan mutu luaran kepada pengguna maka Prodi DKV sebagai penghasil luaran diperhadapkan kepada kredibilitas kualitas penyelenggara. Masyarakat industri membutuhkan jaminan kelayakan akan luaran yang dihasilkan. Maka dipandang perlu bagi prodi-prodi untuk menyatakan hasil luaran mereka dengan sertifikat kompetensi profesi melalui program pendirian unit sertifikasi dalam lingkup prodi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan bekerjasama dengan Asosiasi Prodi DKV (LSP 2) yang tersertifikasi penyelenggaraan layanannya

oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga lulusan telah dibekali dengan sertifikat kompetensi bidang DKV dan siap untuk terjun ke industri. Adapun Asosiasi Profesi DKV dengan salah satu program layanannya sebagai lembaga assesment profesi (LSP 1) adalah perpanjangan tangan jaminan mutu lulusan setelah lulusan diterima di industri.

Dengan demikian, capaian-capaian *learning outcomes* Prodi DKV memiliki reputasi kredibel-akuntabilitas sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi profesi bidang DKV.



Gambar 10. Prodi sebagai penyelenggara sertifikasi profesi (Tempat Uji Kompetensi) Profesi bidang DKV.

3. Paradigma Spmi Prodi DKV

A. Menyikapi Paradigma Revolusi Industri 4.0

Menyikapi tantangan Revolusi Industri 4.0 terkait Sistem Penjaminan Mutu Standar isi seperti yang disebutkan pada pasal 55 PP no.19 tahun 2005 tentang SNP, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi yang meliputi kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran mahasiswa. Kurikulum ini merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Terkait substansi standar isi diantaranya ruang lingkup, landasan penyusunan standar, penetapan standar mutu mekanisme pemenuhan standar, mekanisme pengendalian standar dan peningkatan standar. Terkait Standar Isi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, cakupan kurikulum dan kalender akademik.

Memahami fungsi Standar Isi; (1) Sebagai petunjuk ketua program studi dan unit kerja terkait dengan standar isi dapat merancang, menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan isi standar; (2) Sebagai petunjuk bagi para pejabat struktural dan unit kerja terkait dengan standar isi dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kurikulum sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan; (3) Sebagai petunjuk bagaimana kegiatan kurikulum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang diterapkan.

Menyadari adanya pergeseran paradigma pendidikan abad ke-21 merupakan dampak dari perkembangan teknologi komunikasi yang signifikan di era Digital. Pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam ruang kelas, sekarang dapat dilakukan di ruang bebas (*e-learning*). Begitu juga dengan bahan ajar yang sebelumnya merupakan bahan tercetak menjadi bahan digital yang mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Hal ini merupakan kewajiban bagi tenaga pendidik untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang siap bersaing dalam masyarakat global di era Revolusi Industri 4.0.

Penerapan metode pembelajaran *Learning by Activities* untuk saat ini diharapkan dapat diterapkan oleh pendidik dalam pengembangan kurikulum. *Learning by Activities* bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan *Critical Thinking*, *Creativity*, dan *Problem Solving* yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. *Learning by Activities* tidak membutuhkan biaya yang besar (*Low Cost*). Pendidik diharapkan mampu mencari topik-topik di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan bidang ilmu yang mereka ampu. Hal ini bisa jadi merupakan *win-win solution* bagi mahasiswa dan dosen dalam penerapan *Learning by Activities* di pembelajaran mereka. Dengan metode ini mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisa, dan mencari solusi dari masalah tersebut. Sedangkan untuk pendidik terbantuan dalam pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Metode pembelajaran tersebut di atas hanya merupakan satu metode yang diterapkan. Model *asesment*-nya tentunya dibangun berdasarkan standar acuan capaian pembelajaran sesuai rancangan pembelajaran yang diterapkan.

B. Paradigma Prodi DKV Manajemen Mutu antara Kualitas dan Raihan Akreditasi

Penataan sistem pendidikan tinggi sewajarnya bertolak dari hal-hal yang secara idiil melandasi penyelenggaraannya, dan secara normatif juga sesuai dengan perundangan yang berlaku

di Indonesia. Selalu bercirikan suatu organisasi profesional, dimana hasil dan dampak yang tersalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja sivitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. Maka diperlukan adanya suasana kerja yang berbeda dari organisasi yang bergerak di bidang manufaktur, di mana kualitas kerja sangat ditentukan oleh ketepatan melaksanakan prosedur, yang menyangkut cara, urutan, dan waktu. Penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi kerja menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas suatu organisasi profesional lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat dijadikan salah satu alasan kuat agar perguruan tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi.

Namun perguruan tinggi tidak diselenggarakan dalam 'suatu ruang hampa', perguruan tinggi selalu terkait dan tergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tata nilai, norma, perundangan dan peraturan yang menjadi rambu-rambu dan memandu perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sehingga asas otonomi yang diberlakukan dalam pengelolaan perguruan tinggi, selalu harus disertai dengan pertanggung-jawaban atau akuntabilitas.

Perguruan tinggi memiliki fungsi tertentu di masyarakat, yang dapat disimpulkan sebagai kegunaan bagi masyarakat. Beberapa fungsi yang dianggap melekat pada perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan lulusan yang terdidik, ilmu pengetahuan baru (hasil penelitian) dan jasa pembangunan masyarakat (hasil pengabdian kepada masyarakat). Masyarakat sebagai penyandang aliran sumber daya yang memungkinkan terselenggaranya perguruan tinggi, berhak untuk memperoleh informasi dan menuntut kualitas kinerja perguruan tinggi. Untuk hal itu BAN-PT yang secara mandiri dapat menilai dan mem-'verifikasi' kinerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan di masyarakat. (Hendrawan, 2014)

Berdasarkan hasil diskusi-diskusi yang bersifat informal dalam bahasan soal problem-problem yang ditemui, umumnya masih terkait dengan masalah *soft skill* mahasiswa, seperti: 1) kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, 2) kemampuan analisis yang terkait kemampuan literasi, 3) kemampuan kerjasama tim baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota, 4) tingkat kelulusan pada tiap mata kuliah, 5) lama studi yang umumnya rata-rata 5-7

tahun, 6) tingkat putus kuliah akibat ketidak mampuan mengikuti perkuliahaan atau merasa tidak memiliki baat hingga faktor kemalasan mahasiswa, serta 6) kualitas materi tugas akhir.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya bermuara kepada tingkat raihan peringkat akreditasi sekaligus menjadi kekhawatiran para calon pengguna. Sehingga bisa saja berdampak kepada ketidak kepercayaan industri.

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja menjadi perhatian pengelola prodi untuk membuka ruang-ruang diskusi dan diskursus pada upaya pemecahan masalahnya.

Berdasarkan uraian-uraian hasil diskusi di atas sehingga dalam melakukan kilas balik dalam mengurai permasalahan seputar problematika pendidikan tinggi lingkup Prodi DKV di Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, seperti; 1) lemahnya karakter mahasiswa terkait krisis etis-normatif yang berdampak pada disiplin dan motivasi kerja; 2) lemahnya karakter dosen yang umumnya belum atau tidak pernah bersentuhan langsung dengan karakter industri berdampak pada kesulitan menjabarkan contoh riil soal fakta lapangan, 3) lemahnya kurikulum yang masih belum memiliki relevansi masif dan sistemik terhadap kebutuhan industri, 4) lemahnya manajemen pendidikan akibat faktor ketiga hal diatas, serta 5) lemahnya metode dan mekanisme seleksi yang tentunya menjadi dampak terbesar dari ke-empat poin di atas (kualitas input)

Berangkat dari berbagai titi tolak yang telah disebutkan di atas tentunya memberikan penegasan dan penguatan bahwasanya manajemen pendidikan tinggi mestinya mengadopsi model industri. Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan industri kreatif yang sangat adaptif dengan gerak revolusi-revolusi industri maka pola pendekatan manajemen pendidikan yang mengarah kepada industri sebaiknya kembali dipikirkan kembali dan mengarah kepada model manajemen industri kreatif yang jauh lebih fleksibel dan adaptif.

C. PENUTUP

Menjawab berbagai paradigma jaminan mutu kualitas pendidikan DKV menjadi hal utama yang mesti dipikirkan dan dirumuskan terkait model, format, struktur dan metode dalam upaya memperbaiki mutu lulusan dan menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi revolusi industri 4.0. Pemerintah saat ini memiliki komitmen tinggi kepada upaya-upaya tersebut dengan kebijakan-kebijak yang berbasis mutu lulusan yang kompeten dan kompetitif. Sehingga tentunya apabila lembaga-lembaga pendidikan tinggi turut mendukung komitmen tinggi, terkhusus prodi DKV

sebagai mata tombak penyelenggaraan pendidikan tinggi (*Top-Down Commitment*) dalam mensukseskan program kualitas mutu lulusan.

Program akreditasi perguruan tinggi bisa saja tidaklah cukup dalam menghadapi ancaman global revolusi industri 4.0. dan dominasi lulusan dari luar untuk merebut lapangan kerja vital di Indonesia. Dibutuhkan metode dan model penanganan yang kreatif dan adaptif sebagai senjata mutakhir dalam menghadapi persaingan global (AFTA da MEA) yang semakin kompetitif. Dibutuhkan acuan-acuan standar yang bersifat global sebagai instrumen ukur capaian *learning outcomes*.

Kurikulum dibangun berdasarkan kebutuhan industri dengan cara-cara berpikir kreatif, inovatif, dan adaptabel dengan model-model pembelajaran inovatif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin rigkas dan praktis namun *to the point*, tentunya dengan metode *assesment* yang sesuai dan integratif. Diikuti dengan penerapan SPM yang integratif dan sinkron pula dengan semangat menghadapi tantangan paradigma revolusi industri. Cara apapun yang ditempuh adalah baik selama acuan-acuan standar penjaminan mutu yang digunakan adalah kredibel-akuntabel-integratif dengan melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel seperti lembaga asosiasi profesi, lembaga asosiasi prodi dan lembaga sertifikasi profesional profesi. Tujuannya adalah jaminan mutu kompetensi lulusan yang kompetitif dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu Prodi DKV semestinya tidak hanya membekali lulusan dengan nilai indeks prestasi tetapi juga membekali mahasiswa dengan sertifikat kompetensi profesi yang diasemen oleh lembaga atau badan internal yang tersertifikasi oleh BNSP.

Proses pendidikan yang produktif dan adaptif terhadap perkembangan jaman dengan fokus pada pola-pola peningkatan kualitas metode dan sarana pembelajaran. Metode pengajaran tidak lagi efektif melainkan metode pembelajaran dengan tenaga pendidik yang ideal dengan penguasaan substansi akademik yang baik.

Tanggungjawab akademik dipikul dan diseleenggarakan secara bersama antara dosen dan mahasiswa, dimana peran dosen sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator dan pengarah (konsultatif), proses pembelajaran seluruhnya berpusat kepada mahasiswa. Sehingga hakikat pembelajaran adalah mahasiswa yang belajar, bukan dosen mengajar (Wibisono, 1999).

Idealnya, SPM Prodi DKV disinkronkan dengan keberadaan akselerator SPME, yakni asosiasi prodi DKV dan asosiasi profesi DKV.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifianto, P. F. (2019). PENDIDIKAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL DAN UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDONESIA. *Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA)*, Vol.2, Februari, (pp. 120-130).
- Business Law, T. R. (2019, Januari 21). *Binus University Faculty of Humanities*. Retrieved Agustus 5, 2019, from [business-law.binus.ac.id.: https://business-law.binus.ac.id/2019/01/21/tantangan-pendidikan-era-industri-4-0/](https://business-law.binus.ac.id/2019/01/21/tantangan-pendidikan-era-industri-4-0/)
- Cahyadi, D. (2017). Membangun Infrastruktur Kurikulum Prodi DKV Berbasis Core Business Competencies. *JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI* , 27-40.
- Darmawan, J. (2018, November 27). *Serambi News*. Retrieved Agustus 5, 2019, from [serambinews.com: https://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/menjadi-guru-era-pendidikan-40](https://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/menjadi-guru-era-pendidikan-40)
- Ekarahendy, E. (2015, Desember 17). *Desain Grafis Indonesia*. Retrieved Agustus 6, 2019, from [http://dgi.or.id: http://dgi.or.id/read/news/kkni-desain-grafisdkv-2015-menuju-pengakuan-terhadap-kompetensi.html](http://dgi.or.id/read/news/kkni-desain-grafisdkv-2015-menuju-pengakuan-terhadap-kompetensi.html)
- Hendrawan. (2014, Maret 26). *H2 Hendrawan Notes*. Retrieved Agustus 6, 2019, from [http://hendrawan-notes.blogspot.com: http://hendrawan-notes.blogspot.com/2014/03/paradigma-penataan-sistem-perguruan.html](http://hendrawan-notes.blogspot.com/2014/03/paradigma-penataan-sistem-perguruan.html)
- Kemenristekdikti, T. (2015). *KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA: Dokumen 001*. . Jakarta: Kemenristekdikti.
- Mukti, A. G. (2018). *Sumber Daya Ristekdikti*. Retrieved Agustus 6, 2019, from [http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id: http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id](http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id)
- Simatupang, T. (2018, Juli 1). *slideshare*. Retrieved Agustus 5, 2019, from [www.slideshare.net: https://www.slideshare.net/togar/tantangan-pendidikan-di-era-industri-40?from_action=save](https://www.slideshare.net/togar/tantangan-pendidikan-di-era-industri-40?from_action=save)
- Sukartono. (2018, Desember). *fkip.ums*. Retrieved Agustus 5, 2019, from [http://fkip.ums.ac.id: http://fkip.ums.ac.id/wp-content/uploads/sites/43/2018/12/Revolusi-Industri-4.0-dan-Dampaknya-terhadap-Pendidikan-di-Indonesia-Dr.-Sukartono.doc](http://fkip.ums.ac.id/wp-content/uploads/sites/43/2018/12/Revolusi-Industri-4.0-dan-Dampaknya-terhadap-Pendidikan-di-Indonesia-Dr.-Sukartono.doc)
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Volume 4, No 1 , 17-32.

- Tim, D. P. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh. Edisi Kedua, Cetakan ke-1: 2018*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Penjaminan Mutu.
- Wibisono, E. (1999). Tinjauan Atas Paradigma Kualitas Dalam Pendidikan Tinggi Indonesia. *UNITAS, Vol. 7 No. 2* , 72-82.